

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

PEMILU BERINTEGRITAS

**GAGASAN DAN PRAKTIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS**



Bekerjasama dengan Sekretariat
Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
Republik Indonesia



LP2AB Publishing

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perpustakaan Nasional RI

© Pemilu Berintegritas

Penulis : Muhammad

Editor : Rahman Yasin

Desain Cover: Mutiara Nabilah

Layout: Margono

Cetakan pertama, Desember 2021

x + 171 hal, 14 x 21 cm

ISBN : 978-623-93798-4-1

Diterbitkan oleh:

LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa)

Jl. Swadaya 1 No. 11, Rt 02/01 Duren Sawit Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax (021-866163) Email: lp2ab@gmail.com

Bekerjasama dengan

Sekretariat DKPP RI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULISIII

DAFTAR ISI VII

BAB I

TITIK TEMU ETIKA DAN PEMILU..... 1

- A. Titik Temu Etika dan Pemilu Demokratis3
 - Etika* 3
 - Pemilu Demokratis* 6
- B. Etika Politik dan Etika Berbangsa 12
- C. Membangun Infrastruktur Etika 16
- D. Kode Etik Mendorong Penataan Sistem Etika 20
- E. Kiprah DKPP Menegakkan Etika Pemilu..... 23

BAB II

RELASI PENGUATAN NORMA HUKUM DAN ETIKA 29

- A. Prospek Penegakan Hukum di Indonesia..... 31
- B. Kemunculan Instrumen Penegakan Hukum 35
- C. Memadukan Norma Hukum dan Norma Etika 38
 - Norma Hukum*..... 43
 - Norma Etika*..... 48
 - Norma Agama*..... 55
- D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara 57
 - Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila*..... 57
- E. Etika Kehidupan Berbangsa 61

BAB III
TANGGUNG JAWAB MENEGAKKAN PEMILU
DEMOKRATIS..... 65

A. Mengawal Integritas Penyelenggaraan Pemilu	67
B. Integritas Prosedural dan Substantif	72
<i>Penanganan Kode Etik di Tengah Pandemi</i>	<i>74</i>
C. Merawat Kualitas Pemilu	79
D. Memacu Kinerja Kelembagaan DKPP.....	84
<i>Tugas Penegakan Kode Etik Pemilu.....</i>	<i>85</i>
<i>Cara Kerja Peradilan Etik DKPP.....</i>	<i>90</i>
<i>Independensi Peradilan Etika Pemilu</i>	<i>93</i>

BAB IV
GAGASAN DAN PRAKTIK PEMILU BERINTEGRITAS.... 97

A. Pemilu dan Pilkada Berintegritas	99
<i>Integritas Pemilu</i>	<i>99</i>
<i>Pilkada Berintegritas: Potret Pilkada 2020.....</i>	<i>101</i>
<i>TPD Instrumen Penegakan Kode Etik di Daerah</i>	<i>103</i>
B. Penegakan Kode Etik Pemilu.....	106
<i>Ikatan Moral Dalam Profesi Penyelenggara</i>	<i>107</i>
C. Tantangan Menjawab Pesimisme Publik.....	111
D. DKPP Mewujudkan Komitmen	113

BAB V
MENUJU PERADILAN ETIKA PROFESIONAL..... 117

A. Etika Individu dan Etika Sosial	119
B. Etika Hukum	123

C. Tantutan Peradilan sebagai Perkembangan Modern	113
D. Menidungun Tradisi Konsep Peradilan yang Profesional	119
<i>Prinsip Professionalisme Peradilan</i>	117
<i>Karakter Majelis Hakim Profesional</i>	118

BAB VI	
PENUTUP	141
PENUTUP	141
DAFTAR PUSTAKA	151
INDEKS	159
TENTANG PENULIS	165

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar, Seno, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics'*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisation dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- _____, *Penguatan Sistem Peradilan dan Pemerintahan Presidensial*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Davitt, Thomas E., *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum: Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum*, Yogyakarta: Pallmal, 2012.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1999.
- Gatara, A.A. Sahid, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Hamka, Buya, *Falsafah Hidup*, Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1984.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif: 'Menimbang Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hartono, Dimiyati, *Restorasi Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Era Global Publisher, 2007.

Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

_____, *Peradilan Etika Pemilu: Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas*, Jakarta: LP2-AB, 2019.

_____, *Perubahan Sosial: Pergeseran Paradigma Masyarakat dari Tradisionil ke Modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

_____, *Perubahan Sosial: Pergeseran Paradigma Masyarakat Tradisionil Dalam Perkembangan Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Noer, Delier, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Patrick M. Erwin, "Corporate Codes of Conduct: The Effects of Code Content and Quality on Ethical Performance." *Journal of Business Ethics*, 2011.

Rosenbloom, David, H.1971, *The Constitution As a Basis for Public Administrative Ethics*, kumpulan tulisan yang dihimpun dalam "Readings", *Ethics In Public Office*, oleh Professionals Educational Foundation of The Visyas, INC, dalam A Master's Degree In Fiscal Administration, 1994.

Suseno, Magnis, Franz, *Etika Abad ke 20*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2006.

_____, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 2003.

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Vos, De, H., *Pengantar Etika*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Wignyosoebroto, Saetandnyo, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HuMa, 2002.

- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Hasanu Jusuf, dan Effendy, Rusman, (ed) Rahman Yasin, *Mengurai Konflik Pilkada Maluku Utara*, Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2011.
- Hoesein, Arifn, Zainal, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UDD 1945*, Jakarta: LP2AB, 2019.
- Huntington, Samuel, P., *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Ismail, Ilyas, *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- John, Rawls, A., *Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1998.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1961.
- _____, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, dalam (terj.), Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- _____, *What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, dalam (terj.), Nurulita Yusron, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, Jakarta: Bawaslu.
- M. Raharjo, Dawam, *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung : Mizan, 1993.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Etika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, Jakarta: LP2-AB, 2019.
- _____, *Membantu Terwujudnya Pengawasan Pemilu*, dalam 60

dan_pedoman_perilaku_hakim_dan_norma_perilaku_ aparat_bawas_final.pdf

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/en/arsip/44-bahasa-indonesia/pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1407-hakim-profesional-itu-diciptakan-bukan-dilahirkan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34192/t/Komisi+II+Pastikan+Pemilu+Tetap+pada+2024>

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1274/hakim-wajib-profesional-dalam-memutus-perkar

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/630/ma-miliki-tiga-standar-dalam-menciptakan-hakim-profesional

<https://www.kompas.tv/article/223511/anggota-komisi-ii-komisioner-bawaslu-harus-berani-dan-berintegritas?page=all>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15102&menu=2>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Jurnal dan Sumber Lain

- Aburaera, Sukarno, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006.
- Anwar C., Problematika mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang. Jurnal Konstitusi vol iii NO. 1 JUNI 2010. 128.
- Bahan Sambutan Ketua DKPP Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020, Jakarta.
- Hikam, AS. Muhammad, Forum, Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi. 2008.
- Marilang, Hukum dan Keadilan, ter kutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011.
- Materi Kuliah Etika Profesor Muhammad, Mengawal Pemilu Berintegritas, Majalah, Jakarta: Sekretariat DKPP, Tahun 2019.
- Materi Sudut Etika, Ketua DKPP, Profesor Muhammad, DKPP Berkomitmen Mewujudkan Pemilu Beretika dan Berintegritas, Jurna, Etika dan Pemilu, Jakarta: Sekretariat, DKPP, 2020.
- Muhammad, Bahan Orasi Ilmiah Dalam Pengukuhan Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum Yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Makassar: Unhas, Hari Sabtu, 28 Februari 2015.

Internet

- <http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf>
- https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_

Muhammad yang sejak tanggal 8 Januari 2020 dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP itu, pada rapat pleno yang digelar pimpinan DKPP Hari Rabu tanggal 15 April 2020 berdasarkan musyawarah bersama anggota memutuskan mendaulat dirinya menjadi ketua lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu itu hingga akhir masa bakti 2022. Dengan amanah menjadi ketua DKPP tersebut, Muhammad tetap terus bertekad meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan DKPP dalam mengawal dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara mandiri, profesional dan akuntabel.

PEMILU BERINTEGRITAS

Pemilu berintegritas harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu yang dihasilkan pun sebatas selebrasi atau ornamen dalam politik lima tahunan dan resikonya muncul pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan kode etik (*rule of ethics*) diperlukan. Norma etika dan norma hukum harus bekerja secara baik dan kuat, agar tidak terjadi distorsi dalam urusan pemerintahan negara. Maka dalam konteks implementasi norma hukum dan etika ini, sejatinya tidak perlu mempertentangkan kedua sistem norma ini. Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang tergelincir.

Dalam perspektif itu, penyelenggara dituntut untuk tidak hanya peka terhadap hukum (*sense of regulation*), tetapi harus juga punya kepekaan terhadap etika (*sense of ethics*) karena etika itu tetap menjadi standar perilaku ideal bagi penyelenggara, dan kode etik penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 17 September 1971. Pernah menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi Ketua Bawaslu RI 2012 - 2017. Ia mendapat penganugerahan Bintang Penegak Demokrasi Utama dari Presiden. Sejak awal Januari 2020, ia dipercaya menjadi ketua DKPP hingga akhir masa bakti 2022.